

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SANTUNAN TUNAI (BST)  
BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK  
COVID -19 DI KELURAHAN PATEMON  
KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG**



**PROPOSAL TESIS**

**SAPTO LAKSONO**

**191003631010384**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945**

**SEMARANG**

**2021**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Covid-19 atau penyakit akibat virus corona merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus mematikan. Sejak kasus pertama ditemukan dan diumumkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia maka angka pertambahan kasus covid-19 ini terus berkembang secara eksponensial. Apabila tidak dilakukan Tindakan secara tepat maka akan berakibat fatal karena cepatnya penyebaran virus ini. (<http://www.openjurnal.umpam.ac.id/index.php/JAMH>)

Pemerintah memberlakukan protokol Kesehatan yang diharapkan mampu penanganan pencegahan menyebarnya virus yang semakin meluas. Protokol penanganan virus COVID-19 diantaranya protokol yang meliputi kesehatan, komunikasi, Supervisi bagian perbatasan, ranah edukatif, serta public area dan bagian perhubungan. Namun hal ini masih belum bisa menekan penyebaran virus yang semakin pesat sehingga dibutuhkan percepatan dalam menanganinya yaitu penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Banyaknya kasus bermunculan dari masyarakat luas disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat. Hal itu dikarenakan oleh kurangnya sosialisasi dan pengetahuan akan protocol Pencegahan dan Pengendalian

Covid-19 kepada masyarakat. Sebagian besar masyarakat juga tak mematuhi aturan untuk *stay at home*. Hal inilah yang menjadi alasan Kepala Daerah untuk melakukan Tindakan pencegahan dengan mengunci semua perbatasan wilayah demi mencegah penyebaran wabah yang semakin meluas dengan cepatnya.

Dalam kegiatan PKM ini kami bekerjasama dengan Bapak Sapto Laksono yang membantu Kasie Kesra Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati. Membantu memberikan Bantuan Santunan Tunai dan mendata masyarakat di masing – masing RT yang terdampak Covid -19.

Sekitar 3.000 pekerja yang berada di Kota Semarang, terpaksa dirumahkan akibat kondisi perekonomian yang tak menentupasca wabah Virus Corona atau Covid-19 merebak. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyebut jumlah tersebut berasal dari data yang dihimpun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat."Dari catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ada 2.620 buruh dari berbagai pabrik yang terpaksa dirumahkan," kata Hendrar Prihadi seperti dilansir Antara di Semarang pada Senin (6/4/2020).Selain itu, dilaporkan sekitar 400 lebih pekerja dari 11 hotel di Semarang juga terpaksa dirumahkan. Menurut Hendrar, hampir seluruh lini dunia usaha lesu akibat dampak wabah Virus Corona.( Tribun Jateng,tanggal 7 April 2020).

Kondisi tersebut, lanjut dia, juga dialami oleh pengemudi ojek daring yang sepi penumpang dan pedagang kaki lima yang mengalami sepi pembeli. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sudah menyiapkan upaya antisipasi untuk menangani dampak kesehatan maupun ekonomi akibat pandemi COVID-19 itu, upaya penyemprotan disinfektan terus dilakukan, termasuk penyediaan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis. Kebijakan sosial ekonomi seperti pemberian sembako, keringanan tagihan listrik serta restrukturisasi kredit merupakan respon positif pemerintah. Masalah klasik yang sering terjadi di lapangan dalam skema bantuan ialah ketidakakuratan data penerima bantuan dan kejelasan informasi terutama saluran pengaduan. Program bantuan pemerintah baik pada saat kondisi regular maupun saat bencana tidak terlepas dari pelayanan publik. Pemerintah sebagai aktor pemberi layanan wajib mematuhi asas-asas pelayanan publik yang di antaranya berupa kejelasan informasi dan transparansi. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan masalah sosial baru di kalangan masyarakat. Intensifikasi dan ekstensifikasi saluran komunikasi merupakan skenario wajib yang harus ditempuh.

Banyak pertanyaan di masyarakat terkait bagaimana prosedur penerimaan bantuan, apa saja item bantuan, kapan diberikan serta kemana harus mengadukan jika terjadi ketidaksesuaian atau kesulitan dalam menerima bantuan. Sebagai contoh, masyarakat perlu diberi informasi terkait bantuan

keringan kredit atau cicilan. Tidak semua golongan ekonomi menengah ke bawah yang memiliki cicilan menerima bantuan tetapi kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka, sehingga apabila kewajiban cicilan tersebut tidak sebagai sarana dalam menjalankan atau menghasilkan produksi maka bantuan cicilan tersebut tidak dapat diberikan.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik juga akan turut serta ambil bagian dalam proses pengawasan pelayanan pemberian bantuan pemerintah. Bentuk nyata pengawasan yang dilakukan ORI ialah dengan membuka posko dari pengaduan bagi masyarakat terdampak bencana Covid-19. Pembentukan posko ini diharapkan mampu mengefektifkan pemberian bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan merata di seluruh Indonesia.

Pemberdayaan *Street Level Bureaucracy* (aparatur birokrasi yang melakukan akses langsung dengan publik) Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan koordinasi menjadi kata kunci yang harus dilaksanakan secara efektif dalam situasi pandemi yang membutuhkan keputusan cepat. DTKS merupakan data acuan dalam pemberian bantuan yang berisi profil tingkat kesejahteraan individu dan keluarga. Problematika yang muncul yakni ketidakakuratan data, ada masyarakat yang berhak menerima bantuan namun

tidak mendapatkan ataupun sebaliknya. Koordinasi antar instansi yang lamban dalam hal sinkronisasi data dari bidang sosial dan administrasi kependudukan di tingkat pusat dan daerah juga menambah tingkat kegagalan pelaksanaan kebijakan bantuan.

Kepala desa/ Lurah maupun Ketua RT (Rukun Tetangga) merupakan aktor penting yang perlu diberdayakan untuk menjawab problem DTKS dan koordinasi. Pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum pembersihan DTKS (*cleansing data*) yang dapat dilakukan oleh Kepala desa dan Ketua RT dikarenakan memahami profil masyarakatnya secara dekat. Kepala desa dan Ketua RT juga dapat melakukan koordinasi dengan sistem kelompok kepada Pemerintah Daerah setempat yang lebih terorganisir karena tiap individu tidak langsung mengakses sendiri-sendiri kanal informasi dan pengaduan baik secara *online* (menghubungi jaringan digital yang disediakan pemerintah Pusat dan daerah) maupun *offline* (datang langsung ke dinas sosial atau disdukcapil) yang mengakibatkan antrian panjang penyelesaian.

Penilaian Mandiri oleh Penerima Bantuan. Dalam hal meredakan polemik di masyarakat terkait bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan memudahkan masyarakat untuk menilai dirinya apakah bisa mendapatkan bantuan atau tidak maka terdapat beberapa hal yang patut diketahui.

Pertama, mengetahui apakah dirinya termasuk dalam penerima program PKH atau tidak. Jika penerima PKH otomatis masuk data DTKS dan jika tidak

maka masuk dalam klasifikasi non-DTKS. Hal ini penting diketahui karena kedua jenis data tersebut menerima bantuan yang berbeda.

Kedua, memahami jenis bantuan pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki program bantuan yang berbeda dan tidak diperkenankan menerima semuanya. Sebagai contoh, Pemerintah Pusat meningkatkan jumlah penerima manfaat PKH bagi yang terdata di DTKS dan bantuan santunan tunai (BST) bagi masyarakat yang tidak terdata di DTKS di samping bantuan lainnya seperti bantuan sembako oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD serta BLT yang bersumber dari dana desa.

Ketiga, mampu menjelaskan dirinya terdampak langsung atau tidak langsung akibat Covid-19 dan mengalami kesulitan untuk membayar cicilan alat produksi (motor, mobil, ataupun rumah) yang digunakan untuk usaha. Hal ini merupakan persyaratan untuk bantuan restrukturisasi kredit.

Keempat, memahami isi bantuan maupun keberatan terkait bantuan. Masyarakat harus mengetahui besaran, jenis dan jangka waktu bantuan serta nomor kontak yang dapat dihubungi dalam melakukan pengaduan apabila bantuan yang diberikan tidak sesuai harapan.

Respon cepat pemerintah terkait kelemahan akurasi data serta kordinasi sangat diharapkan dalam memperbaiki implementasi kebijakan pemberian bantuan saat ini, mengingat kondisi pandemi yang masih terus berlangsung. Masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran dan pengetahuan informasi yang komperhensif

terhadap kebijakan bantuan pemerintah agar tidak memicu *distrust* secara vertikal (pemerintah) maupun horizontal (antar masyarakat), terlebih lagi pengetahuan protokol pencegahan Covid-19 dalam pembagian bantuan pemerintah.

Penelitian Eko Yudianto (2019) Tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai ( BNPT) di Kecamatan Kaningan Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pemicu implementasi program BNPT di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo disebabkan oleh faktor sikap (disposisi) kurang berhasil dalam kualitas beras, sasaran rumah tangga penerima manfaat BPNT, jumlah beras yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat.

Penelitian Hasbi Iqbal (2019) Tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan baik, tertib, lancar dan aman. Pelaksanaan lapangan berupa sosialisasi program, verifikasi data, pembagian dana, dan pembuatan laporan.

Penelitian I'matus Zakiyah Liana dkk, (2020) tentang Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid -19 di Desa Gondoarum Kecamatan Kantor Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan bantuan sosial di Desa Gondoarum belum efektif.

Penelitian yang sekarang mengacu pada Penelitian Eko Yudianto (2019) Tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai ( BNPT) di Kecamatan

Kaningan Probolinggo. Perbedaan dengan penelitian yang sekarang adalah Program Bantuan Non Tunia dan objek penelitian di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

Kecamatan Gunungpati yang terdiri dari 16 Kelurahan salah satunya adalah kelurahan Patemon secara rinci mendapat bantuan sosial sebanyak 749.223 paket tersebut adalah total dari bantuan sosial DTKS sejumlah 214.915 paket, Bantuan Sosial PKH sejumlah 42.281 paket, BNPT 36.203 paket, Bantuan Presiden 10.000 paket. Kemudian Bantuan Sosial Pemerintah Kota Semarang yang diberikan secara bertahap(AyoSemarang.com<https://www.ayosemarang.com/read/2020/07/13/60262/pemkot-semarang-salurkan-749223-bantuan-sosial-hingga-juni-2020>).Adanya Bantuan yang diberikan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunung Pati apakah bisa membuat kesejahteraan masyarakat yang terdampak Covid -19 sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang.

**Tabel 1.1**  
**Data Bantuan Santunan Tunai**  
**Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang**  
**Yang Terdampak CoVID -19**

No	RW	Jumlah /Orang
1	I	39
2	II	33
3	III	38
4	IV	40
5	V	31
6	VI	45
7	VII	39
8	VIII	41

<b>Jumlah</b>	<b>306</b>
---------------	------------

**Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2021**

Berdasarkan Tabel 1.1 Menunjukkan bahwa di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang mendapatkan Bantuan Santunan Tunai berjumlah 306 orang yang terdiri dari 8 (delapan) RW dengan perincian RWI berjumlah 39 orang, RW.II Berjumlah 33 orang, RW.III berjumlah 38 orang, RW.IV berjumlah 30 orang, RW. V berjumlah 31 orang, RW.VI berjumlah 45 orang, RW. VII berjumlah 39 orang dan RW.VIII Berjumlah 41 orang.

Berdasarkan latar belakang maka, peneliti mengambil judul penelitian".  
**Implementasi Program Bantuan Santunan Tunai (BST) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid -19 di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunung pati Kota Semarang**

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup Implementasi Program Bantuan Sosial Masyarakat yang Terdampak Covid-19 di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang adalah:

1. Implementasi Program yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam melaksanakan Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19.

2. Kendala Implementasi Program yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam melaksanakan Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19.
3. Upaya Implementasi Program yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam melaksanakan Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana Implementasi program bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terdampak covid -19 di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunung pati Kota Semarang?
2. Apakah kendala Implementasi program bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terdampak covid -19 di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunung pati Kota Semarang?
3. Apakah upaya Implementasi program bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terdampak covid -19 di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunung pati Kota Semarang?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Implementasi program bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terdampak covid -19 di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunung pati Kota Semarang.

2. Mengetahui kendala Implementasi program bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terdampak covid -19 di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunung pati Kota Semarang.
3. Mengetahui upaya Implementasi program bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terdampak covid -19 di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunung pati Kota Semarang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

#### **1.5.1 Manfaat Praktis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang Implementasi program bantuan sosialn tunai bagi masyarakat yang terdampak covid -19 di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunung pati Kota Semarang.\
- b. Memperluas wawasan Untuk Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam rangka pendistribusian bantuan sosial tunai bagi masyarakat yang terdampak Covid-19

#### **1.5.2 Manfaat Teoritis**

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memperoleh pemahaman secara teoritis tentang Teori Implementasi program bantuan sosial tunai bagi masyarakat dan

memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka Melaksananakan program Pemerintah dalam rangka Covid - 19.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Sebagai pembanding dan untuk menghindari duplikasi atas penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, perlu dikemukakan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini yaitu tentang Implementasi Program Bantuan Santunan Tunai (BST) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Covid -19 di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunung pati Kota Semarang.

1. Eko Yudianto Yunus (2019). Yang berjudul Implementasi Program Bantuan Pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Yang mendeskripsikan bahwa faktor penentu implementasi program BPNT di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo adalah faktor sikap (disposisi) kurang berhasil dalam kualitas beras, sasaran rumah tangga penerima manfaat BPNT, jumlah beras yang diterima rumah tangga yang menerima manfaat.
2. Hasbi Iqbal (2019). Yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai tahun di Kabupaten Kudus. Yang mendeskripsikan bahwa

Pelaksanaan program berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan aman. Pelaksanaan lapangan berupa sosialisasi program, verifikasi data, pembagian kartu, pencairan dana, dan pembuatan laporan.

3. Imatus Zakiyah, Liana Oktavia, Fatkhul Khairiyah, Muhammad Afthon Ilman (2020) Yang berjudul Efektivitas pelaksanaan Bantuan Sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak covid-19 di desa gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Yang mendeskripsikan bahwa bantuan sosial di desa Gedongarum belum efektif.
4. Nuniek Dewi Pramanik (2020), Yang berjudul Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat Padalarang pada masa pandemi covid 19. Yang mendeskripsikan bahwa bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai sangat berpengaruh, seharusnya pemerintah kota Padalarang dalam hal ini Pemerintah daerah kabupaten Bandung Barat meningkatkan bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai secara tepat.
5. Wildan Rahmansyah (2020) Yang Berjudul Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan covid-19 di Indonesia. Yang mendeskripsikan bahwa gambaran mengenai peta permasalahan dan penyebab utama dari berbagai permasalahan program bantuan sosial adalah bantuan sosial pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19. Permasalahan peyaluranbantuan sosial yang terjadi antara lain yaitu masalah alokasi anggaran ditiap kementerian berbeda, masalah data penerima bantuan yang tidak terintegrasi, dan masalah sistem

penyaluran bantuan sosial tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swasta agar tepat sasaran, efektif dan efisien serta didukung oleh sistem yang baik, terintegrasi, transparan dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos.

**Tabel 2.1**  
**Iktisar Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Eko Yudianto Yunus (2019), ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407- 6864 (Online) Volume 9 Nomor 2 (SKRIPSI )	Implementasi Program Bantuan Pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan kanigaran kota Probolinggo	Hasil penelitian ini adalah faktor penentu implementasi program BPNT di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo disebabkan oleh faktor sikap (disposisi) kurang berhasil dalam kualitas beras, sasaran rumah tangga penerima manfaat BPNT, jumlah beras yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat.
2.	Hasbi Iqbal (2019) Magister Ilmu Administrasi, TESIS	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai tahun di Kabupaten Kudus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan program berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan aman. Pelaksanaan lapangan berupa sosialisasi program, verifikasi data, pembagian kartu, pencairan dana, dan pembuatan laporan.
<b>No</b>	<b>Nama Peneliti Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>

3. Imatus Zakiyah, Liana Oktavia, Fatkhul Khairiyah, Muhammad Afthon Iman (2020)	Efektivitas pelaksanaan Bantuan Sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak covid-19 di desa gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan bantuan sosial di desa Gedongarum belum efektif
P-ISSN. 1907-0489 E-ISSN 2580-3875		
4. Nuniek Dewi Pramanik (2020), TESIS	Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat Padalarang pada masa pandemi covid 19	Hasil penelitian menggambarkan uji bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai sangat berpengaruh, maka sudah seharusnya pemerintah kota Padalarang dalam hal ini Pemerintah daerah kabupaten Bandung barat meningkatkan bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai secara tepat, mengingat kelangsungan hidup warga padalarang akibat Pandemi covid 19, akibat tidak memperoleh uang untuk membiayai kehidupan mereka.
5. Wildan Rahmansyah (2018) (2020), SKRIPSI Universitas Pajajaran Bandung	Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan covid-19 di Indonesia	Hasil dari penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai peta permasalahan dan penyebab utama dari berbagai carut marut permasalahan program bantuan sosial pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19. Permasalahan peyaluran bantuan sosial

---

yang terjadi antara lain yaitu masalah alokasi anggaran ditiap kementerian berbeda, masalah data penerima bantuan yang tidak terintegrasi, dan masalah sistem penyaluran bantuan sosial tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swasta agar tepat sasaran, efektif dan efisien serta didukung oleh sistem yang baik, terintegrasi, transparan dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos tersebut

---

Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan covid-19 di Indonesia. Sedangkan penelitian yang sekarang adalah Implementasi Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat yang terdampak COVID-19 dengan Subjek penelitian di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

## **2.2 Kajian Pustaka**

### **2.2.1 Ilmu Administrasi Publik**

Menurut Pfiffner dan Presthus yang dikutip Syafei (2003: 31) memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut:

- a. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
- b. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
- c. Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Sedangkan menurut Chander dan Plano dalam Keban (2004: 3) mengemukakan bahwa: “Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam publik.”

Henry dalam Harbani Pasolong (2008: 8), mengemukakan bahwa: “Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.”

Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Sedangkan Waldo dalam Pasolong (2008: 8) mendefinisikan “Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.”

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik.

### **2.2.2. Bantuan Sosial**

Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dinas bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

Pemanfaatan Bantuan Sosial (bansos) Berdasarkan dana APBN dikelompokkan menjadi empat bidang yaitu :

- 1) Bidang pendidikan meliputi Program BOS dan Bea Siswa Pendidikan Siswa /Mahasiswa Miskin.
- 2) Bidang kesehatan meliputi Program Jaskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit kelas III.
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Perdesaan mencakup Kecamatan PPK, P2KP, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan/PPIP, PNPM Daerah Tertinggal/PDT, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).
- 4) Bidang Perlindungan Sosial, meliputi Program Keluarga Harapan/PKH, dan Bantuan Langsung Tunai/BLT (Sri Lestari Rahayu, 2012)

### **2.2.3. Syarat dan Tata Cara Mendapatkan Bantuan Sosial Akibat Covid-19 Dari Pemerintah**

Pemerintah kian sigap dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak virus corona (covid-19). Rencananya, pemerintah akan memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik virus corona atau Covid-19 selain itu juga bagi masyarakat yang tidak menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. Masyarakat calon penerima BST maupun BLT akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 per kepala keluarga setiap bulannya selama tiga bulan. Sehingga total bantuan yang diterima per keluarga adalah Rp 1.800.000,00. Tujuan dari rencana pemberian program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemik virus corona. Nantinya, semua bantuan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menysasar kepada warga terdampak secara langsung maupun tak langsung.

Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.

4. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
6. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat.

Jika Anda termasuk dari warga terdampak covid-19 dan sudah memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial tunai, berikut cara klaimnya:

- Pastikan tidak terdaftar di program bantuan sosial pemerintah yang lain
- Cek apakah nama Anda sudah terdaftar ke penerima bantuan sosial tunai ke RT/RW setempat
- Jika belum, daftarkan diri dengan melampirkan fotokopi KTP untuk diberikan ke kepala desa untuk data Anda diserahkan kepada bank-bank milik negara yang dilibatkan pada program.
- Tunggu informasi selanjutnya mengenai pencairan dana ke rekening Anda (jika memilih sistem transfer)

BST akan disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Pos Indonesia, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan akan diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang sudah atau terdaftar atau belum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos.

Rinciannya,

- BST akan di transfer langsung ke rekening masing-masing penerima atau melalui PT Pos Indonesia.
- Bagi yang memilih sistem transfer rekening, berikut daftar rekeningnya: BRI, BNI, Mandiri dan BTN.
- Bagi yang tak punya rekening bank, ambil uang BLT melalui Kantor Pos. Proses pencairan langsung penerima BLT secara nontunai (transfer) tidak dikenai biaya dan bunga.
- Penerima BST adalah warga yang dianggap layak menerima bantuan dan terkena dampak ekonomi langsung akibat pandemi covid-19 dan sudah dilengkapi dengan data seperti BNBA (*by name by address*), NIK dan nomor handphone.
- Jika melihat ada orang disekitar Anda baik tetangga atau saudara Anda yang mengalami krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 bisa memberitahukan informasi ini, terutama bagi mereka yang benar-benar telah memenuhi syarat namun belum sadar dengan informasi bantuan ini.
- Mari kita bantu siapa saja disekitar kita yang mengalami dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 dengan tidak hanya membagi informasi terkait bantuan sosial

dari pemerintah tapi juga turut membantu mereka yang kurang informasi dengan menuntun mereka bagaimana cara mendaftar agar bisa menerima bantuan sosial ke RT/RW di tempat tinggal Anda. (Kominfo/Toni Efendi) (<https://republika.co.id/berita/qa5n1w2216000/cara-dan-syarat-dapatkan-bantuan-uang-tunai-akibat-covid19>).

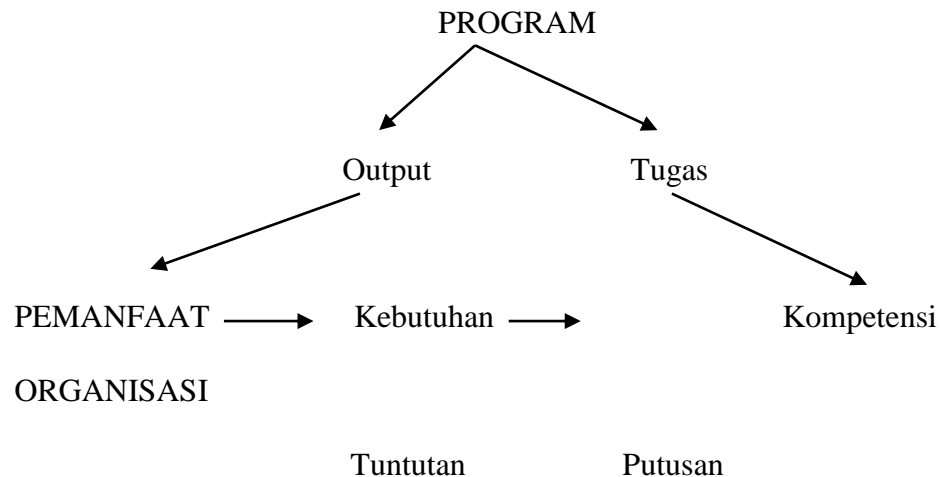
#### **2.2.4. Konsep Implementasi Program**

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

- a. Pengorganisasian Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
- b. Interpretasi Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
- c. Penerapan atau Aplikasi Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak

berbenturan dengan program lainnya. Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten.

Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut :



**Sumber: Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)**

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program.

Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).

Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, Tuntutan Putusan program pemanfaat organisasi output tugas kebutuhan kompetensi yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program (Haedar Akib dan Antonius Tarigan, 2000: 12).

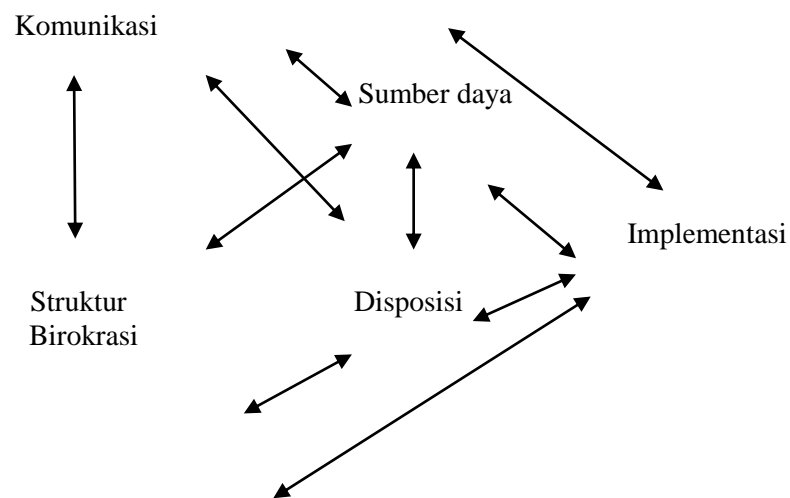
Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan kalau tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan apabila output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas output tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian

antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

### 2.2.5. Model Implementasi

Terdapat banyak model implementasi menurut para ahli, diantaranya model implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn (1975), George Edward III (1980), Grindle (1980) dan Masmanian dan 17 Sabatier (1987). Menurut George Edward III (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.



Gambar 1. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III

#### 1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi Struktur Birokrasi Komunikasi Sumberdaya Disposisi Implementasi (*trasmision*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masingmasing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

## 2. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

### 1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan “*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*”

### 2) Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya “*budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of*

*adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public*". Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa "*new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*". Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

### 3) Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan :

*Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but*

*without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.*

#### 4) Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa:

Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangnya.

### 3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa :

Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi

mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

#### 4. Struktur birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106)

mencangkup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi". Menurut Winarno (2005:150), "*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa:

Demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi" Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa:

Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif?.

## 6. COVID -19 (*Corona Virus Disease*)

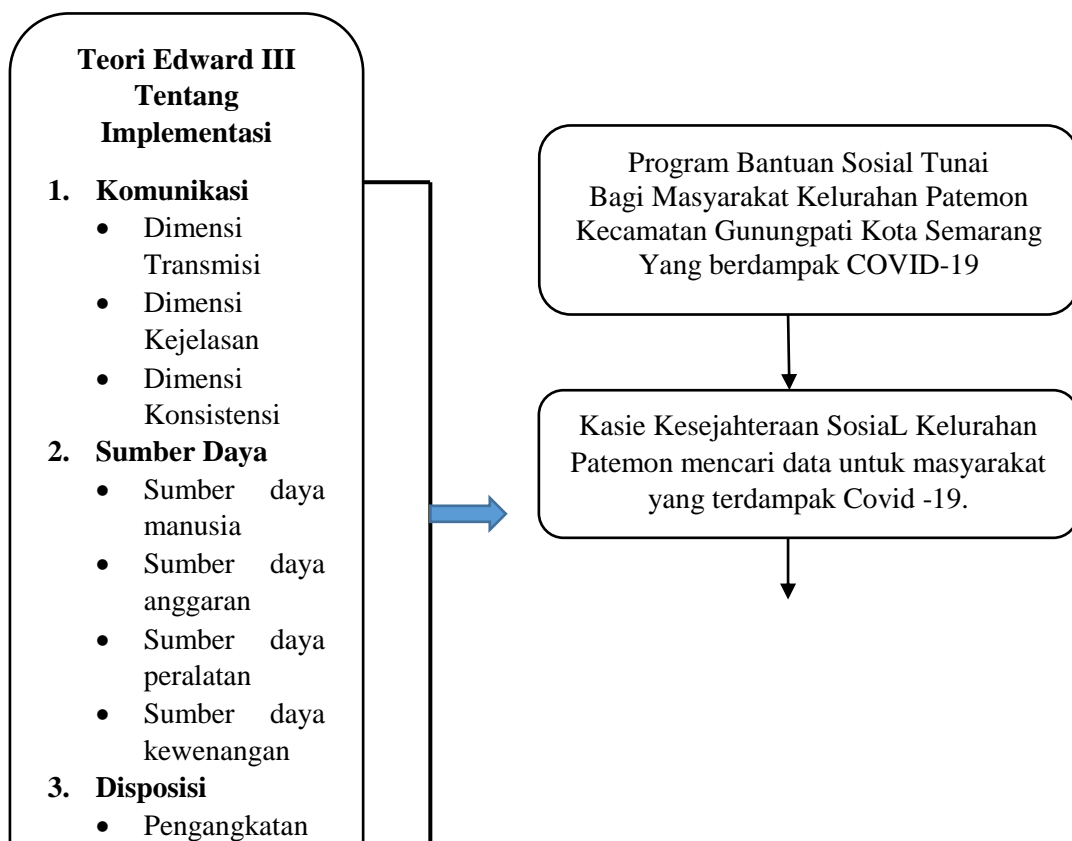
*Coronavirus* merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. *Coronavirus* tergolong *ordo Nidovirales*, keluarga *Coronaviridae*. *Coronaviridae* dibagi dua subkeluarga dibedakan berdasarkan serotipe dan karakteristik genom. Terdapat empat genus yaitu alpha coronavirus, betacoronavirus, deltacoronavirus dan gamma coronavirus.

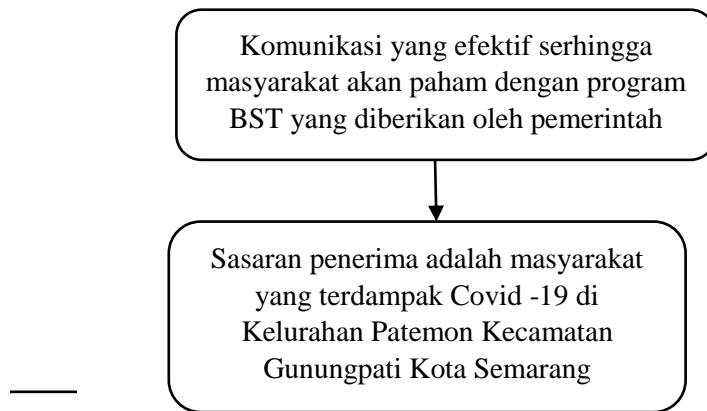
Karakteristik Coronavirus memiliki kapsul, partikel berbentuk bulat atau elips, sering pleimorfik dengan diameter sekitar 50-200m. Semua virus ordo Nidovirales memiliki kapsul, tidak bersegmen, dan virus positif RNA serta memiliki genom RNA sangat panjang. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus kedalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang). Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat diinaktifkan oleh desinfektan mengandung klorin, pelarut lipid dengan suhu 56°C selama 30 menit, eter, alkohol, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oxidizing agent dan kloroform. Klorheksidin tidak efektif dalam menonaktifkan virus.

## A. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Penamaan kerangka pemikiran bervariasi, kadang disebut juga dengan kerangka konsep, kerangka teoritis atau model teoritis (theoretical model).

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran





**Gambar. 2.1 Kerangka Pemikiran Implementasi Program Bantuan sosial Tunai Bagi Masyarakat yang terdampak Covid -19 di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunung pati Kota Semarang**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. ( Sugiyono, 2016). Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk

memperoleh data sesuai dengan telaah penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

### 3.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian menurut Suharsini Arikunto (2016) ada beberapa metode penelitian :

- (1) Metode Eksploratif, adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu obyek secara relatif.
- (2) Metode Eksplanatori, adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel.
- (3) Metode Deskriptif, adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan sesuatu seperti apa adanya secara mendalam. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.
- (4) Metode Penelitian Evaluasi, adalah penelitian bertujuan menilai sesuatu dengan cara membandingkannya dengan suatu patokan atau standar.

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian deskriptif dengan penjelasan secara kualitatif. Deskriptif karena peneliti hanya semata-mata ingin melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan naturalistic. Menurut Sugiyono (2018) yaitu bahwa :

“ Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) Obyek yang alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah.“

Melalui pendekatan naturalistik, peneliti dapat mengetahui tanggapan dan persepsi dari berbagai kalangan, seperti terhadap Implementasi Program Bantuan Santunan Tunai bagi Masyarakat yang terdampak Covid -19 di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat melihat keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian sangat terkait dengan permasalahan (perumusan masalah), oleh karena itu fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang gambaran di lapangan dan topik pokok yang akan digali, walaupun fokus terkadang dapat berubah dan berkembang di lapangan sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian yang di temukan di lapangan.

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan memberikan penjelasan tentang “Implementasi program Bantuan Santunan Tunai di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang’.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Sebelum pengumpulan data perlu diperhatikan macam-macam apa yang diperlukan, dimana diperoleh data, bagaimana cara memperolehnya serta jumlah

yang tepat. Karena pada dasarnya penelitian ini yang penting adalah dalam data yang diperoleh dari sumber data yang diharapkan.

Menurut Danim (2002, 137-141) adapun pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut :

a. Angket terbuka adalah seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis dalam lembaran kertas atau sejenisnya dan disampaikan kepada responden penelitian untuk diisi tanpa intervensi dari peneliti atau pihak lain. Angket terbuka untuk penelitian kualitatif umumnya tidak berstruktur artinya kuesioner yang berisi sejumlah pertanyaan, yang jawabannya ditentukan oleh responden tanpa perlu campur tangan peneliti.

b. Wawancara mendalam

Wawancara ada dua jenis :

- 1). Wawancara relatif berstruktur adalah wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan disertai alternatif jawabannya namun sangat terbuka bagi perluasan jawaban.
- 2). Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara bebas, peneliti hanya mengajukan sejumlah pertanyaan atau pertanyaan yang mengundang jawaban atau komentar subjek secara bebas.

c. Observasi partisipan

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data, untuk terlaksananya observasi dengan baik perlu disusun instrumen (pedoman observasi), pedoman observasi biasanya dalam bentuk *chek list* atau daftar isian.

d. Format-format

Format biasanya dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan data lapangan atau jumlah kelompok subjek tertentu, data yang dijaring melalui format merupakan data penunjang bukan data utama.

Misalnya memproyeksikan data tertentu mengetahui komposisi suatu objek (komposisi penduduk, menurut umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, penghasilan, status sosial).

### **3.5. Instrumen Penelitian**

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Bogdan (dalam Moleong 2011:164) mendefinisikan pengamatan berperan serta sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil

penelitiannya. Moleong (2011:169) ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen adalah mencakup :

1. *Responsif*, manusia sebagai instrumen responsif terhadap lingkungan dan terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan.
2. *Dapat menyesuaikan diri*, manusia sebagai instrument hampir tidak terbatas dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data.
3. *Menekankan keutuhan*, manusia sebagai instrumen memanfaatkan imajinasi dan kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan.
4. *Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan*, manusia sebagai instrumen penelitian terdapat kemampuan untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman praktisnya.
5. *Memproses data secepatnya*.
6. *Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan mengikhtisarkan*, kemampuan untuk menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh subjek atau responden.
7. *Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim dan idiosinkratik*, manusia sebagai instrument memiliki kemampuan untuk menggali informasi yang lain dari yang lain, yang tidak direncanakan semula, yang tidak diduga terlebih dahulu, atau yang tidak lazim terjadi.

Disamping peneliti sebagai instrumen, juga memanfaatkan instrumen penunjang lainnya seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman studi dokumentasi yang dapat melengkapi kekurangan instrumen berdasarkan peneliti.

#### **a. Sumber Data**

Yang dimaksud dari sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Sebelum penelitian berhasil mencapai sasarannya, maka data-data yang diperoleh harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, peneliti mengumpulkan data-data yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh sedangkan berpedoman dari keterangan diatas maka di dalam penelitian ini mengambil sumber data antara lain disebutkan dibawah ini :

Sumber data primer. Yaitu untuk memperoleh sumber data pokok, dimana diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh melalui metode wawancara, observasi atau pengamatan. Adapun yang termasuk dari data primer dalam penelitian ini adalah informan yaitu dari pengambil (proveder) kebijakan pengembangan obyek wisata kawasan Kota Semarang Lama.

Sumber data sekunder. Yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari laporan-laporan, buku di perpustakaan, dokumen-dokumen, wawancara langsung dengan pihak yang terkait.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti dalam mengkoleksi data melakukan kontak langsung dan berhubungan secara kontinyu dengan informan dan dalam

setting yang wajar. Teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) yang diharapkan mampu menjelaskan pendapat, keyakinan serta sikap informan terhadap kondisi atau keadaan yang alami dan observasi sebagai upaya untuk menunjang pemahaman penelitian mengenai kondisi lapangan serta mengungkapkan keadaan atau kejadian-kejadian yang dijelaskan atau terletak dari hasil wawancara dengan informan.

Menurut Moleong (2011:132) Informan merupakan orang-orang dalam pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan target adalah individu yang bekerja atau masih menjalin hubungan (interaksi) dengan pegawai-pegawai di Dinas Pariwisata Kota Semarang. Adapun dalam penelitian ini informannya adalah di pelaku (actor) pengembangan obyek wisata kawasan Kota Semarang Lama.

### **3.6. Analisa Data**

Data dalam penelitian ini dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Hal ini senada dengan pernyataan Chaterine Marshall, dan Gretvhen B. Rossman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono bahwa:

*“The fundamental methods relied on by qualitative research or gathering information are, participation in the setting, direct observation, in depth interviewing, document review”.*

Dari paparan diatas dapat diartikan metode yang pokok dari penelitian kualitatif untuk pengumpulan informasi, aturan pengambilan bagian, observasi secara langsung, *interview* secara dalam, tinjauan buku. Adapun dalam penelitian ini analisa data bertujuan untuk mencari dan menata data secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut :

1. **Observasi** adalah metode ilmiah yang biasa diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan dengan sistematika terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap hal-hal atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Dengan harapan data yang diperoleh dapat diterapkan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan data yang diperoleh dengan wawancara dan observasi yang dilakukan.
2. **Wawancara** (*interview*) merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Esterberg (2002) seperti dikutip oleh Sugiyono mendefinisikan interview sebagai berikut:

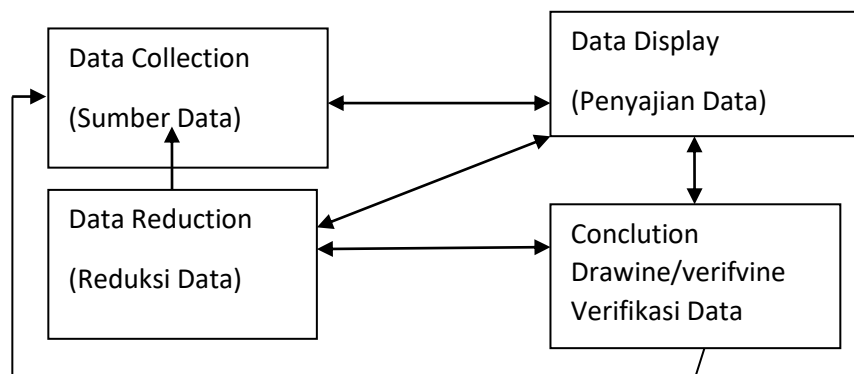
*“A meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning, about a particular topic”*

Wawancara adalah percakapan tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dalam

penelitian ini digunakan untuk menjawab beberapa permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

**3. Dokumentasi** digunakan untuk menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya. Proses analisa data dalam penelitian ini mengadopsi pemikiran Miles dan Huberman (1984). Yang pada dasarnya meliputi tiga alur kegiatan setelah proses pengumpulan data yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Namun, analisa data tidak dilakukan secara parsial dan berdiri sendiri tetapi dilakukan secara terus menerus dan terintegrasi selama dan setelah proses pengumpulan data dilakukan di lokasi penelitian, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

**Gambar Proses Analisa Data**



Sumber : Miles dan Huberman (1984)

1. **Reduksi data (*data reduction*)**, suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhaan data, pengabstrakan data dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
2. **Penyajian data (*data display*)**, dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun sehingga memeberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan adalah bentuk naratif, bentuk matriks, grafik dan bagan.
3. **Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing and verification*)**, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada.

Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari

lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi. Menurut Saebani (2009:155) proses analisis data dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. Analisis data sebelum di lokasi penelitian, dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan peneliti untuk menentukan fokus penelitian.
2. Analisis data selama di lokasi penelitian, dilakukan selama di lapangan, peneliti akan memperoleh jawaban langsung yang jawabannya dipandang sudah relevan, memuaskan dan cukup sehingga peneliti dapat terus menggali informasi selama masih dibutuhkan sebagai bahan analisisnya.
3. Analisis setelah selesai penelitian di lapangan, dilakukan dengan berbagai pendekatan terutama dalam menafsirkan isi data yang berkaitan dengan masalah dan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan berdasarkan pendekatan metode kualitatif yang menitikberatkan pada penelitian deskriptif terhadap data-data yang berasal dari hasil wawancara berstruktur dan bebas serta hasil observasi. Kemudian demi keabsahan data yang telah didapatkan tersebut maka dilakukan pemeriksaan keabsahan atau verifikasi.

Menurut Poerwandari (dalam Saebani, 2009:130) , penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman, dan lain-lain: **Keabsahan Data.** Dalam setiap penelitian diperlukan adanya standar untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap penelitian, dimana dalam penelitian yang bersifat kualitatif standarisasi tersebut sering diartikan sebagai keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data, yang diguna untuk keperluan silang dan perbandingan terhadap data yang ada. Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan ( *trustworthiness* ) data dilakukan dengan ketekunan pengamatan, kecukupan referensi, kebergantungan, kepercayaan data, keteralihan, kepastian dan triangulasi (*pemeriksaan atau pengecekan ulang data dengan data lainnya*). Moleong (1991) membedakan triangulasi sebagai teknik dalam pemeriksaan data yang memanfaatkan dengan penggunaan sumber, metode, teori/kepuustakaan dan penyidik atau pakar sebagai berikut :

- a. Triangulasi teori atau kepuustakaan, dilakukan dengan memperhatikan, memahami, memperbandingkan data, mengintreprestasikan data hasil penelitian dengan data hasil wawancara dengan informan. Serta memeriksa hasil interprestasi data dengan teori atau kepuustakaan dan hasil penelitian lain yang dijadikan rujukan.

- b. Triangulasi data dengan sumber atau data, dilakukan dengan membandingkan dan memahami terhadap apa-apa yang dibicarakan atau dikatakan orang di hadapan halayak atau dimuka umum dengan apa-apa yang disampaikan atau dibicarakan orang di internal. Serta membandingkan, memahami dan menginterpretasikan keadaan atau situasi daeah penelitian sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh orang dan mengkonfermasikan data sekunder dan data primer.
- c. Triangulasi data dengan para penyidik atau para pakar, dilakukan dengan membandingkan pernyataan seseorang dengan berbagai pendapat umum dan pendapat atau analisis pakar sesuai dengan masalah dalam penelitian, dan membandingkan hasil pengamatan, wawancara dan data sekunder yang ada dengan kondisi riil atau kondisi nyata.

Yin (2003) mengajukan 4 kriteria keabsahan dan keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah Sebagai berikut :

- a. **Keabsahan Konstruk (*Construct validity*)**, bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastiaan bahwa yang berukur benar- benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

pengecekan atau Sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton (dalam Sulistiany 1999) ada 4 macam triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu :

1. Triangulasi data menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
2. Triangulasi Pengamat, adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data.
3. Triangulasi Teori, penggunaan berbagai teori yang berlawanan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat.
4. Triangulasi metode, penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

**b. Keabsahan Internal (*Internal validity*)**, merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan ini dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat. Aktivitas dalam melakukan penelitian kualitatif akan selalu berubah dan tentunya akan mempengaruhi hasil dari

penelitian tersebut. Walaupun telah dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada kemungkinan munculnya kesimpulan lain yang berbeda.

**c. Keabsahan Eksternal (*Eksternal validity*),**

mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Meskipun dalam penelitian kualitatif memiliki sifat tidak ada kesimpulan yang pasti, penelitian kualitatif tetapi dapat dikatakan memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut memiliki konteks yang sama.

**d. Keajegan (*Reabilitas*),** merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang penelitian yang sama, sekali lagi.

Dalam penelitian ini, keajegan mengacu pada kemungkinan peneliti selanjutnya memperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan sekali lagi dengan subjek yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keajegan penelitian kualitatif selain menekankan pada desain penelitian, juga pada cara pengumpulan data dan pengolahan data. Sedangkan triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berlainan.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

### 4.1.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km<sup>2</sup> yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km. Kondisi geografis kota Semarang dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini:

**Gambar 4.1**  
**Peta Kota Semarang**



**Sumber : Bappeda Kota Semarang,2021**

Kota Semarang memiliki Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, yaitu dengan Visi “*Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya*”.

Adapun Misi Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal.

#### **4.1.2 Kondisi Geografis Kota Semarang**

Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi di Pulau Jawa, dengan letak geografis antara garis 6<sup>o</sup> 50’–7<sup>o</sup> 10’ Lintang Selatan dan garis 109<sup>o</sup> 35’–110<sup>o</sup> 50’ Bujur Timur, dengan batasbatas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu Udara berkisar antara 20-30 Celcius dan suhu rata-rata 27 Celcius. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai 359,00 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang juga terbagi atas daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Daerah perbukitan/dataran tinggi di sebelah selatan kota yang dikenal dengan sebutan Semarang atas mempunyai ketinggian 90–359 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75–3,5 meter di atas permukaan laut dan dikenal dengan sebutan Semarang bawah.

#### **4.1.3 Gambaran Umum Kecamatan Gunungpati**

Wilayah Kecamatan Gunungpati yang terdiri dari 16 Kelurahan, seluas 5.399,085 Ha. Wilayah Kecamatan Gunungpati mempunyai fungsi sebagai wilayah penyangga bagi daerah dibagian bawah Kota Semarang, dalam kaitannya dengan fungsi konservasi dapat menjaga fungsi lindung bagi sumber daya alam. Wilayah Gunungpati berdasarkan keadaan geografisnya berada pada ketinggian 259 meter dari permukaan laut, dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Barat
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Banyumanik
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Mijen

#### **4.1.4 Gambaran Umum Kelurahan Patemon**

##### **Asal usul Desa Patemon Kecamatan Gunungpati**

Patemon adalah berasal dari kata “TEMON” yang artinya pertemuan. Maka dari itu Desa Patemon adalah desa pertemuan, yang konon katanya dahulu Desa Patemon adalah sebagai desa pertemuan antara orang-orang Belanda dengan orang-orang atau prajurit dari Indonesia.

### Kondisi Geografis

1. Tanah Sawah : ±258.694 Ha
2. Tanah Pekarangan/Bangunan : ± 100.700 Ha
3. Lapangan Olah Raga : ± 1 Ha

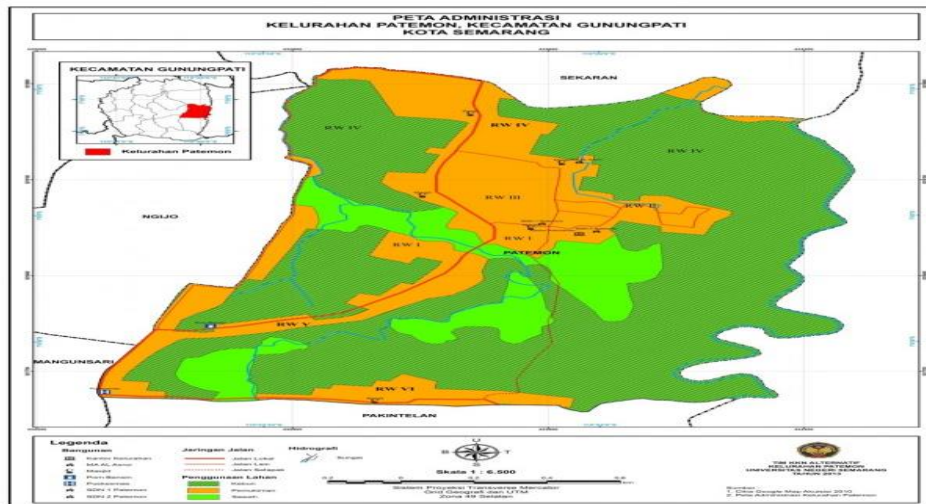
### Batas-batas Wilayah :

- Sebelah Barat : Kelurahan Ngijo
- Sebelah Utara : Kelurahan Sekaran
- Sebelah Timur : Kelurahan Srandol Kulon
- Sebelah Selatan : Kelurahan Pakintelan

- Jumlah Penduduk Jiwa : 5804 Jiwa
- Jumlah Penduduk KK : 1815 KK
- : 2960 Jiwa

- Jumlah Laki Laki

**Gambar 2**  
**Peta Administrasi Kelurahan Patemon**



**Sumber : Bappenda Kota Semarang**

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Implementasi Program yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam melaksanakan Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19.**

#### **1. Komunikasi**

Bantuan sosial (bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. bansos bisa “dengan syarat” atau “tanpa syarat”, diberikan melalui Kementerian/Lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara (untuk korban bencana), atau tetap (penyandang cacat), dan dapat berupa uang atau barang.

Pemerintah kian sigap dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak virus corona (covid-19). Rencananya, pemerintah akan memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah

bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik virus corona atau Covid-19 selain itu juga bagi masyarakat yang tidak menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. Masyarakat calon penerima BST maupun BLT akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 per kepala keluarga setiap bulannya selama tiga bulan. Sehingga total bantuan yang diterima per keluarga adalah Rp 1.800.000,00. Tujuan dari rencana pemberian program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemik virus corona. Nantinya, semua bantuan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menysasar kepada warga terdampak secara langsung maupun tak langsung.

*Berdasarkan wawancara dengan Lurah Patemon yaitu Bapak. Bambang Heryanto. Pada tanggal Hari Senin Tanggal 6 September 2021 Pukul 9.00 WIB di ruang kerjanya Beliau menyatakan bahwa saya cara komunikasi dengan warga yang terdampak Covid -19 yaitu tujuannya untuk membantu berdasarkan program dan aturan yang diberikan oleh Pemerintah yaitu Bantuan Santunan Tunai (BST) untuk masyarakat yang tedampak Covid-19 di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati sehingga warga yang benar-benar ada di data dari kementrian sosial, sehingga pihak kelurahan*

tidak bisa menambah selain kalau ada perintah untuk menambah wargayang terdampak Covid-19. Kelurahan mendata setelah ada laporan dari RT/RW Setempat karena yang mengerti kondisi warganya dalah pihak RT/RW. dengan tujuan sedikit membantu keadaan ekonominya....mungkin begitu mbak.Sedangkan Komunikasi yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon adalah komunikasi yang bisa dipahami oleh masyarakat,sehingga masyarakat betul- betul tau Bantuan tersebut untuk yang terdampak Covid -19mungkin bisa tau juga bantuan tersebut tidak akan selamanya diberikan.Komunikasi dilakukan pada saat bantuan tersebut akan cair dan warga biasanya mendapat undangan dari BNI, dengan jadwal yang sudah ditentukan sehingga warga tidak berduyun-duyun untuk mengantri,dan biasanya antrian dilaksanakan di Kantor Pos atau di Kecamatan masing-masing dengan didampingi Pekerja Sosial Masyarakat, BABINSA, BABINKABTIMNAS. Dan dari Kelurahan Kasie Kesos.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Lurah Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Bapak Bambang Heryanto Pada Hari Senin Tanggal 5 September 2021 Pukul 11.00 WIB di Ruang kerjanya. Bapak Bambang menyatakan bahwa Program yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam melaksanakan Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19. Sudah sesuai sasaran bagi warga saya yang terdampak Covid-19 karena sebelumnya Bapak RW melaporkan warganya yang terdampak Covid-19 ke Kelurahan Patemon, Tapi ya kadang ada yang salah sasaran yang tidak layak mendapatkan terdaftar di laporan pendataan. Tapi biasanya yang layak disumbangkan ke kas RT.ya... yang mengambil tetap yang menerima karena KTP asli di tunjukkan di petugas Kantor Pos.

Wawancara dengan Bapak Ketua RW.01 Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Bapak Taufik Romadhon pada hari Minggu Tanggal 5 September 2021 Pukul 20.00 WIB di Balai RW.I. Menyatakan bahwa Bantuan Santunan Tunai di RW saya sih... kelihatannya sudah tepat sasaran ya..yang saya data dan saya laporkan ke Kelurahan memang yang benar-benar masyarakat yang terdampak Covid-19. Tapi kadang warga ada yang complain Pak.itu kan orang kaya punya mobil kok dapat bantuan sedangkan sayakan bekerja di bangunan kok gak dapat pak..gimana tuh pemerintah...ya ..kadang warga belum memahami kalau yang dapat adalah orang yang kena PHK dimana dia bekerja gitu mas.....

*Bapak Ketua RW.02 Kecamatan Gunungpati Bapak Nuryanto manambahi apa keterangan yang diberikan oleh Bapak RW.01. Beliau juga menyatakan bahwa banyak komplain dari warga yang tidak mampu tidak mendapat bantuan sedangkan warga yang mampu mendapat bantuan, kan lumayan Pak RW Rp.600.000 buat saya bisa untuk amakan 1 minggu terus saya yang bilang dan memahamkan bahwa yang mendapat bantuan adalah warga yang terdampak Covid- 19 dan dikeluarkan dari pekerjaan sehingga biarpun punya Kendaraan dan punya Hp Adroid yang dapat bantuan...tapi saya selaku Ketua RW juga dilemma dalam menyikapi Bantuan Santunan Tunai. Yang saya mengikuti ada dengan peraturan yang ada....*

*Wawancara dengan penerima yaitu Ibu Kotiah dari RW. 04 , Ibu Mutmainah dari RW.03, Ibu Kusmiyati dari RW.02 dan Ibu Duriyah dari RW. 01 pada hari minggu tanggal 7 September di Aula Kantor Kelurahan Patemon. Keempat ibu tersebut merasa senang dan mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah yang masih mau memperhatikan saya... pak ,tadinya saya berempat kan bekerja di garment tapi karena ada pandemi j saya di putus hubungan kerjanya. Ahamdulillah dapat bantuan ini bisa untuk menopang hidup saya,sebelum saya mendapatkan pekerjaan lagi..sekarang mencari pekerjaan juga susah..*

## **2. Sumber Daya**

Faktor sumber daya adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuasaan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Selain itu, ada ketepatan atau kelayakan anatara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal

pembentukan staff pelaksanaan Bantuan Santunan Tunai ( BST) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial SEMBAKO Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak Covid 19 Di Kota Semarang. Dalam pelaksanaanya,staff yang ada di Dinas Sosial Kota Semarang meliputi Koordinator PKH, Tim Koordinator Kota Dinas Sosial serta Staff bidang Penanganan Bantuan Santunan Tunai yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM ) Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Dalam hal penyaluran kepada masyarakat Dinas Sosial Kota Semarang khususnya Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati bersama dengan BNI sebagai fasilitas yang digunakan untuk memanfaatkan nominal yang sudah ada dalam kartu tersebut menjadi bahan-bahan sembako. Pelaksanaan Bantuan Santunan Tunai (BST) di Kota Semarang di Kelurahan Patemon dalam hal anggaran berkurang dikarenakan penyesuaian terhadap pagu untuk penerima bantuan yang terdampak Covid-19 terus berkurang dikarenakan ada masyarakat yang sudah berkerja lagi sehingga dihapus dari data.

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang

bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan.

Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak

bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

*Berdasarkan wawancara dengan Lurah Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu Bapak yaitu Bapak Bambang Heryanto. Pada tanggal Hari Senin Tanggal 6 September 2021 Pukul 11.00 WIB di ruang kerjanya Beliau menyatakan bahwa di Kelurahan Patemon tidak adan masalah karena Kasie Kesejahteraan Sosial dan petugas IT selalu memahami tentang memasukkan data Bantuan Santuan Tunai. dan Staf cara menjelaskan kepada warga yang menerima bantuan sosial tunai sudah secara jelas , akurat dan konsisten personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas sudah tepat sasaran bagi warga yang terdampak Covid -19 saya sebagai lurah juga ikut bertanggung jawab dengan adanya program dari Kementrian Sosial yang harus diberikan untuk warga miskin yang sudah ter update di data. Ya kalau di tempat saya yang bertugas dari berbagai latar pendidikan...semua kan bisa dipelajari tidak harus mempunyai skill yang khusus.*

### **3. Disposisi atau Sikap**

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan

misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Apabila petugas memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan BST di Kota Semarang Terkait sikap pelaksana Pemberian BST yang dalam hal ini Dinas Sosial, Pendamping Sosial Masyarakat , Pengelola ,Kasie Kesos di Kelurahan Patemon cukup optimal dengan menjalankan tupoksi mereka masing-masing. Dapat dilihat pendamping sosial sebagai pelaksana kebijakan selama ini terus aktif dalam memberikan informasi. Informasi yang diberikan terkait pertemuan, pengarahan kepada warga yang terdampak Covid-19 tentang jadwal pengambilan bantuan jika bantuan sudah masuk untuk diambil di Kantor Pos atau Kecamatan Setempat dengan didampingi petugas dari BNI. Sikap pelaksana menentukan keberjalanan suatu program dengan karakter dan komitmen pelaksana dalam menjalankan suatu program kebijakan. Kasie Kesos Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang menjalankan tugas sebagaimana sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni dalam pelaporan, monitoring, evaluasi dalam disposisi Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang memiliki karakter sesuai dengan arah kebijakan PERMENSOS Nomor 54/HUK/2020, begitu juga dengan sikap Kasie Kesejahteraan Sosial Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang langsung turun dan memantau yang terjadi di

lapangan dibuatlah komunikasi melalui platform chatting sehingga kebijakan tersebut dijalankan dengan responsif dan efektif.

*Lurah Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu Bapak Bambang Heryanto Pada tanggal Hari Jum'at Tanggal 4 September 2021 Pukul 09.00 WIB. Kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana ya.. tentunya sepenuh hati dalam rangka membantu warga saya yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai yang diserahkan melewati Kantor Pos dan biasanya di Kecamatan juga ada tapi yang didampingi oleh petugas dari BNI, ditempat saya teratur dan tidak gerombolan dalam mengambil BST nya karena Kasie Kesosnya menjadwalkan Per 2 RW mulai jam 08.00 -10.00 untuk seterusnya mengikuti. Pendistribusikan dengan menggunakan ATM dari BNI. Dan saya tidak hanya mengandalkan pada pegawai saya saja akan tetapi saya terjun lapangan langsung melihat bagaimana cara mendistribusikan kepada penerima bantuan dan bantuan tersebut. Ya apabila pada saat hari yang dijadwalkan tidak hadir keesokan harinya bisa diambil melalui Kantor Pos Terdekat.*

#### 4. **Struktur Birokrasi**

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. SOP menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dalam PERMENSOS Nomor 11 Tahun 2018 dijelaskan bahwa dalam penetapan tim koordinasi pada pasal 44 ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota, begitu juga selanjutnya diatur pada tingkatan kecamatan, dan kelurahan

yang diatur masing-masing melalui Surat Keputusan Kecamatan dan Kelurahan. Dalam hal pelaksanaan melalui struktur birokrasi yang jelas maka Standar Operasional Prosedur (SOP) akan terlaksana dengan baik. Pada tataran Pemerintahan Kota dalam hal ini Dinas Sosial sudah melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial SEMBAKO Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak Covid 19

Badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu: Kompetensi dan ukuran staf suatu badan; Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana; Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif); Vitalitas suatu organisasi; Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif

tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan , implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

*Berdasarkan Wawancara dengan Lurah Petemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu Bapak Bambang Heryanto . Pada tanggal Hari Selasa Tanggal 7 September 2021 Pukul 13.00 WIB. Beliau mengatakan bahwa Struktur Birokrasi yang ada di Kelurahan Patemon adalah yang paling utamanya adalah disiplin aparaturnya, Kejujuran aparaturnya,budaya kerja yang loyal dan mempunyai sifat demokratis yang tinggi. Ya ...seandainya ada pegawai saya yang tidak disiplin ya..tidak hanya disiplin melakukan absen tetapi juga disiplin tentang tugas yang diemban msaing- masing pegawai.ya kalau tidak jujur segera saya laporkan ke Kepegawaian ya.. tingkat Kecamatan terlebih dahulu.Budaya kerja setiap pegawai diharapkan loyal dengan pimpinnan dan loyal dengan teman kerja dan loyal dengan warga masyarakat.*

Penelitian Eko Yudianto (2019) tentang Implementasi Program Bantuan Pangan non tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran kota Probolinggo. Bahwa hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor penentu implementasi program BPNT di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo disebabkan oleh faktor sikap (disposisi)

kurang berhasil dalam kualitas beras, sasaran rumah tangga penerima manfaat BPNT, jumlah beras yang diterima rumah tangga sasaran penerima manfaat.

Penelitian Liana Oktavia, Fatkhul Khairiyah, Muhammad Afthon Ilman (2020) , tentang Efektivitas pelaksanaan Bantuan Sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak covid-19 di desa gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan bantuan sosial di desa Gedongarum belum efektif.

Nuniek Dewi Pramanik (2020), Dampak bantuan paket sembako dan bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat Padalarang pada masa pandemi covid 19 Hasil penelitian menggambarkan uji bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai sangat berpengaruh, maka sudah seharusnya pemerintah kota Padalarang dalam hal ini Pemerintah daerah kabupaten Bandung barat meningkatkan bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai secara tepat, mengingat kelangsungan hidup warga padalarang akibat Pandemi covid 19, akibat tidak memperoleh uang untuk membiayai kehidupan mereka.

**4.2.2 Kendala Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam melaksanakan Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19.**

Pemerintah tengah mengupayakan penyelarasan data untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Namun, menggelontorkan bantuan sosial agar tepat guna bukanlah persoalan yang mudah. kendala implementasi bantuan sosial yang pertama adalah memastikan orang yang terkena dampak mendapatkan bantuan ini. Yang kedua adalah memberikan bantuan yang memadai. Apakah manfaat program setara pendapatan yang hilang. Apakah selama pelatihan mendapatkan pembelajaran baru untuk kompensasi dia masuk sistem kerja yang baru. Ketiga, adalah *time delivery duration*, pelaksanaan program tersebut harus dipikirkan secara matang untuk berapa lama. Keempat, harus melihat kemampuan keuangan pemerintah pusat maupun daerah, dukungan parlemen serta memahami potensi konflik yang bisa terjadi di masyarakat. Kelima, harus melihat dampaknya terhadap kesejahteraan. Bantuan bukan hanya bagi warga miskin bahwa fokus dari pemberian bantuan sosial ini tidak hanya bagi mereka yang termasuk miskin dan rentan miskin, tetapi juga mereka yang termasuk kelas menengah namun karena pandemi rentan turun kelas.

*Wawancara dengan Bapak .Lurah Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Bapak Bambang Heryanto, Beliau menyatakan bahwa Kendala Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam melaksanakan Program adalah pada saat penerima bantuan tidak terdata semua, sehingga ada kecemburuan dari warga juga terdampak Covid-19. Ya...saya sudah memberikan tugas kepada bapak RT/RW setempat yang mengerti kondisi warganya.*

#### **4.2.3 Upaya Implementasi Program Bantuan Santunan Tunai yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam melaksanakan Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19.**

Upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon kecamatan Gunungpati adalah mendata ulang bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Dengan cara yang selektif. Karena Bantuan Secara Tunai akan diperpanjang. Pertama, memastikan data penerima bantuan sosial (bansos) sudah diperbaharui (update). Hal tersebut penting karena mobilitas kelompok masyarakat rentan miskin dan penduduk miskin berubah dalam waktu yang cepat selama pandemi. Yang tadinya tidak masuk kelompok bansos tunai, bisa saja sekarang karena kehilangan pekerjaan jadi masuk kelompok penerima,” Kedua, pemerintah perlu mempercepat verifikasi rekening penerima bantuan lantaran dinilai masih ada rekening yang tidak aktif atau penerima ganda pada penyaluran sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dengan pihak perbankan agar nama dan alamat terverifikasi.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Implementasi Program yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam melaksanakan**

## **Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19.**

### 1. Komunikasi

Pemerintah kian sigap dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi mereka yang terdampak virus corona (covid-19). Rencananya, pemerintah akan memberikan beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik virus corona atau Covid-19 selain itu juga bagi masyarakat yang tidak menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. Masyarakat calon penerima BST maupun BLT akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 per kepala keluarga setiap bulannya selama tiga bulan.

Berdasarkan wawancara dengan Lurah Patemon yaitu Bapak. Bambang Heryanto. Pada tanggal Hari Senin Tanggal 6 September 2021 Pukul 9.00 WIB di ruang kerjanya Beliau menyatakan bahwa saya cara komunikasi dengan warga yang terdampak Covid -19 yaitu tujuannya untuk membantu berdasarkan program dan aturan yang diberikan oleh Pemerintah yaitu Bantuan Santunan Tunai (BST) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati sehingga warga yang benar-benar ada di data dari kementerian sosial, sehingga pihak kelurahan tidak bisa menambah selain kalau ada perintah untuk menambah wargayang terdampak Covid-19. Kelurahan mendata setelah ada laporan dariRT/RW Setempat karena yang mengerti kondisi warganya dalah pihak RT/RW. dengan tujuan sedikit membantu keadaan ekonominya....mungkin begitu mbak.Sedangkan Komunikasi yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon adalah komunikasi yang bisa dipahami oleh masyarakat,sehingga masyarakat betul- betul tau Bantuan tersebut untuk yang terdampak Covid -19mungkin bisa tau juga bantuan tersebut tidak akan selamanya diberikan.Komunikasi dilakukan pada saat bantuan tersebut akan cair dan warga biasanya mendapat undangan dari BNI, dengan jadwal yang sudah ditentukan sehingga warga tidak berduyun-duyun untuk mengantri,dan biasanya antrian dilaksanakan di Kantor Pos atau di Kecamatan masing-masing dengan didampingi Pekerja

Sosial Masyarakat, BABINSA, BABINKABTIMNAS. Dan dari Kelurahan Kasie Kesos.

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Lurah Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Bapak Bambang Heryanto Pada Hari Senin Tanggal 5 September 2021 Pukul 11.00 WIB di Ruang kerjanya. Bapak Bambang menyatakan bahwa Program yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam melaksanakan Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19. Sudah sesuai sasaran bagi warga saya yang terdampak Covid-19 karena sebelumnya Bapak RW melaporkan warganya yang terdampak Covid-19 ke Kelurahan Patemon, Tapi ya kadang ada yang salah sasaran yang tidak layak mendapatkan terdaftar di laporan pendataan. Tapi biasanya yang layak disumbangkan ke kas RT.ya... yang mengambil tetap yang menerima karena KTP asli di tunjukkan di petugas Kantor Pos.

Wawancara dengan Bapak Ketua RW.01 Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Bapak Taufik Romadhon pada hari Minggu Tanggal 5 September 2021 Pukul 20.00 WIB di Balai RW.I. Menyatakan bahwa Bantuan Santunan Tunai di RW saya sih... kelihatannya sudah tepat sasaran ya..yang saya data dan saya laporkan ke Kelurahan memang yang benar-benar masyarakat yang terdampak Covid-19. Tapi kadang warga ada yang complain Pak.itu kan orang kaya punya mobil kok dapat bantuan

sedangkan sayakan bekerja di bangunan kok gak dapat pak..gimana tuh pemerintah...ya ..kadang warga belum memahami kalau yang dapat adalah orang yang kena PHK dimana dia bekerja gitu mas.....

Bapak Ketua RW.02 Kecamatan Gunungpati Bapak Nuryanto manambahi apa keterangan yang diberikan oleh Bapak RW.01. Beliau juga menyatakan bahwa banyak komplain dari warga yang tidak mampu tidak mendapat bantuan sedangkan warga yang mampu mendapat bantuan, kan lumayan Pak RW Rp.600.000 buat saya bisa untuk amakan 1 minggu terus saya yang bilang dan memahamkan bahwa yang mendapat bantuan adalah warga yang terdampak Covid- 19 dan dikeluarkan dari pekerjaan sehingga biarpun punya Kendaraan dan punya Hp Adroid yang dapat bantuan...tapi saya selaku Ketua RW juga dilemma dalam menyikapi Bantuan Santunan Tunai. Yang saya mengikuti ada dengan peraturan yang ada....

Wawancara dengan penerima yaitu Ibu Kotiah dari RW. 04 , Ibu Mutmainah dari RW.03, Ibu Kusmiyati dari RW.02 dan Ibu Duriyah dari RW. 01 pada hari minggu tanggal 7 September di Aula Kantor Kelurahan Patemon. Keempat ibu tersebut merasa senang dan mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah yang masih mau memperhatikan saya... pak ,tadinya saya berempat kan bekerja di garment tapi karena ada pandemi j saya di putus hubungan kerjanya. Ahamdulillah dapat bantuan ini bisa untuk

menopang hidup saya, sebelum saya mendapatkan pekerjaan lagi..sekarang mencari pekerjaan juga susah..

## **2. Sumber Daya**

Dalam hal pembentukan staff pelaksanaan Bantuan Santunan Tunai ( BST) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial SEMBAKO Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak Covid 19 Di Kota Semarang. Dalam pelaksanaanya,staff yang ada di Dinas Sosial Kota Semarang meliputi Koordinator PKH, Tim Koordinator Kota Dinas Sosial serta Staff bidang Penanganan Bantuan Santunan Tunai yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM ) Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Dalam hal penyaluran kepada masyarakat Dinas Sosial Kota Semarang khususnya Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati bersama dengan BNI sebagai fasilitas yang digunakan untuk memanfaatkan nominal yang sudah ada dalam kartu tersebut menjadi bahan-bahan sembako. Pelaksanaan Bantuan Santunan Tunai (BST) di Kota Semarang di Kelurahan Patemon dalam hal anggaran berkurang dikarenakan penyesuaian terhadap pagu untuk penerima

bantuan yang terdampak Covid-19 terus berkurang dikarenakan ada masyarakat yang sudah berkerja lagi sehingga dihapus dari data.

Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Berdasarkan wawancara dengan Lurah Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu Bapak yaitu Bapak Bambang Heryanto. Pada tanggal Hari Senin Tanggal 6 September 2021 Pukul 11.00 WIB di ruang kerjanya Beliau menyatakan bahwa di Kelurahan Patemon tidak adan masalah karena Kasie Kesejahteraan Sosial dan petugas IT selalu memahami tentang memasukkan data Bantuan Santuan Tunai. dan Staf cara menjelaskan kepada warga yang menerima bantuan sosial tunai sudah secara jelas, akurat dan konsisten personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas

sudah tepat sasaran bagi warga yang terdampak Covid -19 saya sebagai lurah juga ikut bertanggung jawab dengan adanya program dari Kementerian Sosial yang harus diberikan untuk warga miskin yang sudah ter update di data. Ya kalau di tempat saya yang bertugas dari berbagai latar pendidikan.semua kan bisa dipelajari tidak harus mempunyai skill yang khusus.

### **3. Disposisi atau Sikap**

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Apabila petugas memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Pelaksanaan BST di Kota Semarang Terkait sikap pelaksana Pemberian BST yang dalam hal ini Dinas Sosial, Pendamping Sosial Masyarakat , Pengelola ,Kasie Kesos di Kelurahan Patemon cukup optimal dengan menjalankan tupoksi mereka masing-masing. Dapat dilihat pendamping sosial sebagai pelaksana kebijakan selama ini terus aktif dalam memberikan informasi. Informasi yang diberikan terkait pertemuan, pengarahan kepada warga yang terdampak Covid-19 tentang jadwal pengambilan bantuan jika bantuan sudah masuk untuk diambil di Kantor Pos atau Kecamatan Setempat dengan didampingi petugas dari BNI. Sikap pelaksana

menentukan keberjalanan suatu program dengan karakter dan komitmen pelaksana dalam menjalankan suatu program kebijakan. Kasie Kesos Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang menjalankan tugas sebagaimana sesuai tugas pokok dan fungsinya yakni dalam pelaporan, monitoring, evaluasi dalam disposisi Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang memiliki karakter sesuai dengan arah kebijakan PERMENSOS Nomor 54/HUK/2020, begitu juga dengan sikap Kasie Kesejahteraan Sosial Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang langsung turun dan memantau yang terjadi di lapangan dibuatlah komunikasi melalui platform chatting sehingga kebijakan tersebut dijalankan dengan responsif dan efektif.

Lurah Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu Bapak Bambang Heryanto Pada tanggal Hari Jum'at Tanggal 4 September 2021 Pukul 09.00 WIB. Kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana ya.. tentunya sepenuh hati dalam rangka membantu warga saya yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai yang diserahkan melewati Kantor Pos dan biasanya di Kecamatan juga ada tapi yang didampingi oleh petugas daari BNI, ditempat saya teratur dan tidak gerombolan dalam mengambil BST nya karena Kasie Kesosnya menjadwal Per 2 RW mulai jam 08.00 -10.00 untuk seterusnya mengikuti. Pendistribusikan *dengan menggunakan* ATM dari BNI. Dan saya tidak hanya mengandalkan pada pegawai saya saja akan tetapi saya terjun lapangan langsung melihat bagaimana cara mendistribusikan kepada penerima bantuan dan bantuan tersebut. Ya apabila

pada saat hari yang dijadwalkan tidak hadir keesokan harinya bisa diambil melalui Kantor Pos Terdekat.

#### 4. **Struktur Birokrasi**

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. SOP menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Dalam PERMENSOS Nomor 11 Tahun 2018 dijelaskan bahwa dalam penetapan tim koordinasi pada pasal 44 ditetapkan oleh Surat Keputusan Walikota, begitu juga selanjutnya diatur pada tingkatan kecamatan, dan kelurahan yang diatur masing-masing melalui Surat Keputusan Kecamatan dan Kelurahan. Dalam hal pelaksanaan, melalui struktur birokrasi yang jelas maka Standar Operasional Prosedur (SOP) akan terlaksana dengan baik. Pada tataran Pemerintahan Kota dalam hal ini Dinas Sosial sudah melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial SEMBAKO Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 67 Tahun 2020 tentang Bantuan Sosial Bagi Warga Terdampak Covid 19

Berdasarkan Wawancara dengan Lurah Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yaitu Bapak Bambang Heryanto . Pada tanggal Hari Selasa Tanggal 7 September 2021 Pukul 13.00 WIB. Beliau mengatakan bahwa Struktur Birokrasi yang ada di Kelurahan Patemon adalah yang paling utamanya adalah disiplin aparaturnya, Kejujuran aparaturnya, budaya kerja yang loyal dan mempunyai sifat demokratis yang tinggi. Ya ...seandainya ada pegawai saya yang tidak disiplin ya..tidak hanya disiplin melakukan absen tetapi juga disiplin tentang tugas yang diemban masing- masing pegawai.ya kalau tidak jujur segera saya laporkan ke Kepegawaian ya.. tingkat Kecamatan terlebih dahulu.Budaya kerja setiap pegawai diharapkan loyal dengan pimpinnan dan loyal dengan teman kerja dan loyal dengan warga masyarakat.

#### **4.3.2 Kendala Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam melaksanakan Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19.**

Pemerintah tengah mengupayakan penyelarasan data untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Namun, menggelontorkan bantuan sosial agar tepat guna bukanlah persoalan yang

mudah. kendala implementasi bantuan sosial yang pertama adalah memastikan orang yang terkena dampak mendapatkan bantuan ini. Yang kedua adalah memberikan bantuan yang memadai. Apakah manfaat program setara pendapatan yang hilang. Apakah selama pelatihan mendapatkan pembelajaran baru untuk kompensasi dia masuk sistem kerja yang baru. Ketiga, adalah *time delivery duration*, pelaksanaan program tersebut harus dipikirkan secara matang untuk berapa lama. Keempat, harus melihat kemampuan keuangan pemerintah pusat maupun daerah, dukungan parlemen serta memahami potensi konflik yang bisa terjadi di masyarakat. Kelima, harus melihat dampaknya terhadap kesejahteraan. Bantuan bukan hanya bagi warga miskin bahwa fokus dari pemberian bantuan sosial ini tidak hanya bagi mereka yang termasuk miskin dan rentan miskin, tetapi juga mereka yang termasuk kelas menengah namun karena pandemi rentan turun kelas.

Wawancara dengan Bapak .Lurah Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Bapak Bambang Heryanto, Beliau menyatakan bahwa Kendala Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam melaksanakan Program adalah pada saat penerima bantuan tidak terdata semua, sehingga ada kecemburuan dari warga juga terdampak Covid-19. Ya..saya sudah memberikan tugas kepada bapak RT/RW setempat yang mengerti kondisi warganya.

#### **4.3.3 Upaya Implementasi Program Bantuan Santunan Tunai yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam melaksanakan Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19.**

Upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon kecamatan Gunungpati adalah mendata ulang bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Dengan cara yang selektif. Karena Bantuan Secara Tunai akan diperpanjang. Pertama, memastikan data penerima bantuan sosial (bansos) sudah diperbaharui (update). Hal tersebut penting karena mobilitas kelompok masyarakat rentan miskin dan penduduk miskin berubah dalam waktu yang cepat selama pandemi. Yang tadinya tidak masuk kelompok bansos tunai, bisa saja sekarang karena kehilangan pekerjaan jadi masuk kelompok penerima,” Kedua, pemerintah perlu mempercepat verifikasi rekening penerima bantuan lantaran dinilai masih ada rekening yang tidak aktif atau penerima ganda pada penyaluran sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dengan pihak perbankan agar nama dan alamat terverifikasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Program yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam melaksanakan Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19.

Komunikasi : cara komunikasi dengan warga yang terdampak Covid -19 yaitu tujuannya untuk membantu berdasarkan program dan aturan yang diberikan oleh Pemerintah yaitu Bantuan Santunan Tunai (BST) untuk masyarakat yang tedampak Covid-19 di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati sehingga warga yang benar-benar ada di data dari kementrian sosial, sehingga pihak kelurahan tidak bisa menambah selain kalau ada perintah untuk menambah wargayang terdampak Covid-19. Kelurahan mendata setelah ada laporan dariRT/RW Setempat

Sumber Daya Kelurahan Patemon masalah dapat dengan mudah diatasi karena Kasie Kesejahteraan Sosial dan petugas IT selalu memahami tentang memasukkan data Bantuan Santuan Tunai. dan Staf cara menjelaskan kepada warga yang menerima bantuan sosial tunai sudah secara jelas , akurat dan konsisten personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas sudah tepat sasaran bagi warga yang terdampak Covid -19 saya sebagai lurah juga ikut bertanggung jawab dengan adanya program dari Kementrian Sosial yang harus diberikan untuk warga miskin yang sudah ter update di data. Ya kalau di tempat saya yang bertugas dari

berbagai latar pendidikan..semua kan bisa dipelajari tidak harus mempunyai skill yang khusus.

Disposisi dan Sikap Kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai pelaksanaanya tentunya sepenuh hati dalam rangka membantu warga yang mendapatkan Bantuan Sosial Tunai yang diserahkan melewati Kantor Pos dan biasanya di Kecamatan juga ada tapi yang didampingi oleh petugas dari BNI,ditempat saya teratur dan tidak gerombolan dalam mengambil BST nya karena Kasie Kesosnya menjadwal Per 2 RW mulai jam 08.00 -10.00 untuk seterusnya mengikuti.Pendistribusikan *dengan menggunakan* ATM dari BNI. Dan saya tidak hanya mengandalkan pada pegawai saya saja akan tetapi saya terjun lapangan langsung melihat bagaimana cara mendistribusikan kepada penerima bantuan dan bantuan tersebut. apabila pada saat hari yang dijadwalkan tidak hadir keesokan harinya bisa diambil melalui Kantor Pos Terdekat.

Struktur Birokrasi yang ada di Kelurahan Patemon adalah yang paling utamanya adalah disiplin aparaturnya, Kejujuran aparaturnya,budaya kerja yang loyal dan mempunyai sifat demokratis yang tinggi.Seandainya ada pegawai saya yang tidak disiplin ya..tidak hanya disiplin melakukan absen tetapi juga disiplin tentang tugas yang diemban masaing- masing pegawai.ya

kalau tidak jujur segera saya laporkan ke Kepegawaian. tingkat Kecamatan terlebih dahulu. Budaya kerja setiap pegawai diharapkan loyal dengan pimpinnan dan loyal dengan teman kerja dan loyal dengan warga masyarakat.

2. Kendala Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam melaksanakan Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19.

Pemerintah tengah mengupayakan penyelarasan data untuk menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Namun, menggelontorkan bantuan sosial agar tepat guna bukanlah persoalan yang mudah. kendala implementasi bantuan sosial yang pertama adalah memastikan orang yang terkena dampak mendapatkan bantuan ini. Yang kedua adalah memberikan bantuan yang memadai. Apakah manfaat program setara pendapatan yang hilang. Apakah selama pelatihan mendapatkan pembelajaran baru untuk kompensasi dia masuk sistem kerja yang baru. Ketiga, adalah *time delivery duration*, pelaksanaan program tersebut harus dipikirkan secara matang untuk berapa lama. Keempat, harus melihat kemampuan keuangan pemerintah pusat maupun daerah, dukungan parlemen serta memahami potensi konflik yang bisa terjadi di masyarakat. Kelima, harus melihat dampaknya terhadap kesejahteraan. Bantuan bukan hanya bagi warga miskin bahwa fokus dari

pemberian bantuan sosial ini tidak hanya bagi mereka yang termasuk miskin dan rentan miskin, tetapi juga mereka yang termasuk kelas menengah namun karena pandemi rentan turun kelas. Kendala Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam melaksanakan Program adalah pada saat penerima bantuan tidak terdata semua, sehingga ada kecemburuan dari warga juga terdampak Covid-19 sudah memberikan tugas kepada bapak RT/RW setempat yang mengerti kondisi warganya.

3. Upaya Implementasi Program Bantuan Santunan Tunai yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dalam melaksanakan Program Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat yang Terdampak Covid-19.

Upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Patemon kecamatan Gunungpati adalah mendata ulang bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Dengan cara yang selektif. Karena Bantuan Secara Tunai akan diperpanjang. Pertama, memastikan data penerima bantuan sosial (bansos) sudah diperbaharui (update). Hal tersebut penting karena mobilitas kelompok masyarakat rentan miskin dan penduduk miskin berubah dalam waktu yang cepat selama pandemic, tidak masuk kelompok bansos tunai, bisa saja sekarang karena kehilangan pekerjaan jadi masuk kelompok

penerima,” Kedua, pemerintah perlu mempercepat verifikasi rekening penerima bantuan lantaran dinilai masih ada rekening yang tidak aktif atau penerima ganda pada penyaluran sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dengan pihak perbankan agar nama dan alamat terverifikasi.

## **5.2 Saran**

Pemerintah sebaiknya sebelum melakukan program bantuan sosial ditengah pandemi covid-19 sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat awam akan bantuan tersebut. Dan diharapkan untuk pembaca, terkait peluang yang bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya oleh para pembaca artikel atau peneliti yang berminat dengan tema penelitian.

## **LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN**

### **Komunikasi**

1. Apa tujuannya Bantuan Santunan Tunai ?

2. Bagaimana komunikasi dilakukan ?
3. Dalam beBerapa periode tertentu komunikasi dilakukan?
4. Apakah Saudara memahaminya?
5. Apakah bisa melaksanakan?

### **Sumber Daya**

1. Apakah sumberdaya untuk melaksanakan mencukupi?
2. Apakah mempunyai skill sesuai bidang tugasnya?
3. Jumlah pelaksana berapa?
4. Apakah mempunyai informasi yang relevan mengenai pemahaman?
5. Sumber dana yang ada seperti apa?
6. Sarana dan Prasarana apa yang dimiliki?

### **Disposisi atau Sikap**

1. Bagaimana kesadaran dan tanggungjawabnya sebagai pelaksana?
2. Apakah ada petunjuk dari atasan yang harus diikuti?
3. Harus melaksanakan apa sesuai prioritas?

### **Struktur Birokrasi**

1. Bagaimana SOP tentang BPNT?
2. Apakah saudara memahaminya?

## DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009) cet.1, h.88 7 Ibid., h.89 58

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 229.

Suardi Lubis, Metodologi Penelitian Sosial, (Medan : USU Prees, 1987), h.101 63 2

Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Alfabeta, 2009),

Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (terj. Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992) h.19-19. 65

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008) cet.6, h.341. 66.

<https://www.ayosemarang.com/read/2020/07/13/60262/pemkot-semarang-salurkan-749223-bantuan-sosial-hingga-juni-2020>.